

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

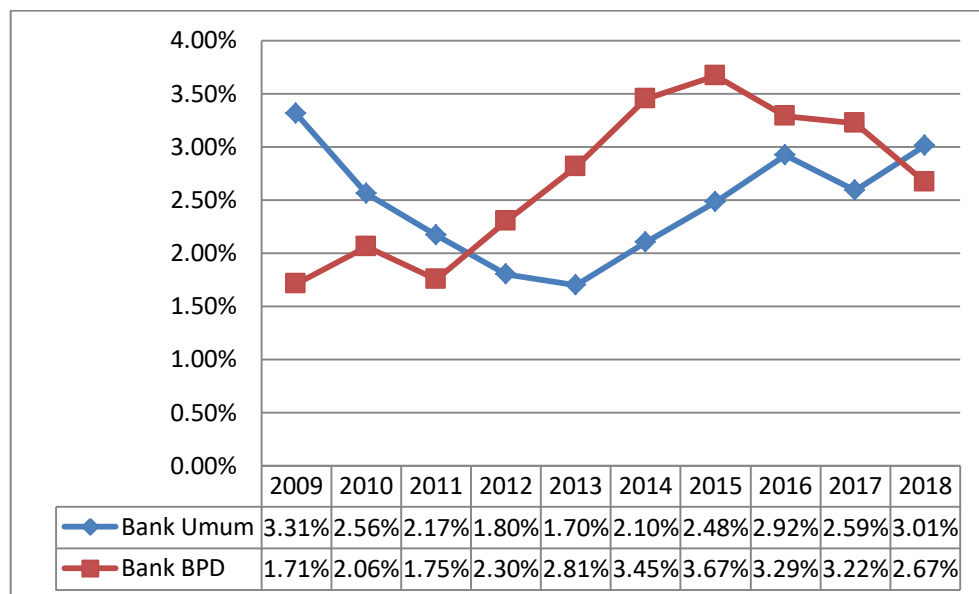
Bank sebagai sebuah lembaga keuangan (*financial institution*) memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Fungsi utama perbankan Indonesia menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 adalah “sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak”. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf perekonomian suatu negara. Menurut Kasmir (2012), bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Gezu (2014) menyatakan bahwa peran pembangunan (*role of development*) yang dilakukan oleh sektor perbankan akan menentukan langkah dalam pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, stabilitas sektor perbankan adalah kunci untuk pembangunan ekonomi.

Menurut Yanti (2012), dalam sistem perbankan Indonesia, Bank Pembangunan Daerah memiliki peran yang cukup penting sebagai lembaga intermediasi yang beroperasi dalam lingkup Daerah Tingkat 1 dan sekitarnya. Melalui kegiatan penyaluran kredit, Bank Pembangunan Daerah (BPD) dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang kemudian akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 62 Tahun 1999 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah pasal 2 menyatakan bahwa BPD mempunyai tugas pokok yaitu mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatan BPD sebagai bank. Dalam menjalankan usaha sebagai lembaga keuangan yang menuai kepercayaan dan jasa, setiap bank berusaha sebanyak mungkin menarik nasabah baru, memperbesar dana dalam bentuk simpanan dan juga memperbesar keuntungan dengan memberikan kredit (Simorangir, 2004). Firmansyah (2014), menyatakan bahwa kredit menjadi pemasukan utama dalam membiayai operasional bank yang ada di Indonesia. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Sebagai lembaga intermediasi keuangan Bank Pembangunan Daerah tidak luput dari adanya potensi risiko yang akan timbul. Risiko utama yang dihadapi BPD adalah risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko dimana nasabah atau debitur atau *cointerparty* tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya sesuai kontrak/kesepakatan yang telah dilakukan. Risiko kredit dapat diindikasikan dengan tingginya rasio kredit non lancar atau *non performing loan* (NPL). Semakin tinggi nilai NPL pada suatu bank mencerminkan bahwa bank tersebut menghadapi risiko kredit yang semakin tinggi. Ukuran NPL yang normal berkisar antara 0% sampai dengan 5% secara bruto terhadap total kredit. Jika ukuran NPL sudah melampaui rentang tersebut, maka manajemen bank harus

segera mengambil tindakan untuk mencegah meningkatnya NPL dan mengembalikan NPL keukuran normal. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Umum Konvensional menyatakan bahwa batas maksimum NPL *netto* adalah 5% dari total kredit. Apabila melewati batas tersebut maka akan digolongkan dalam bank “dalam Pengawasan Intensif” yang bermakna bank tersebut memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Pada 2018 NPL Bank Pembangunan Daerah masih berada pada posisi yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari NPL Bank Pembangunan Daerah yang masih berada di bawah batas maksimum 5% yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Berikut adalah gambar mengenai perkembangan *non performing loan* (NPL) Bank Umum dan Bank Pembangunan Daerah pada tahun 2009 – 2018 yaitu :



Gambar 1.1 Perkembangan *Non Performing Loan* Bank Pembangunan Daerah dan Bank Umum Tahun 2009 – 2018

Sumber :Laporan Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2009- 2018 (diolah)

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa NPL bank umum tahun 2009 – 2011 lebih tinggi dibandingkan dengan NPL Bank Pembangunan Daerah. Pada tahun 2009 NPL bank umum sebesar 3,31% dan 2011 NPL bank umum sebesar 2,17%. Sedangkan NPL Bank Pembangunan Daerah pada tahun 2009 sebesar 1,71% dan tahun 2011 sebesar 1,75%. Namun tahun 2012 – 2017 NPL Bank Pembangunan Daerah lebih tinggi dibandingkan dengan NPL bank umum, yaitu dimana NPL Bank Pembangunan Daerah pada 2012 sebesar 2,30% dan tahun 2017 sebesar 3,22%. Sedangkan NPL bank umum pada 2012 sebesar 1,80% dan 2017 sebesar 2,59%.

Nilai NPL Bank Pembangunan daerah yang terus mengalami peningkatan, namun secara umum NPL Bank Pembangunan Daerah masih di bawah batas maksimum 5% yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Adanya tren peningkatan NPL harus menjadi perhatian khusus bagi BPD di Indonesia untuk mengutamakan prinsip kehati-hatian serta tetap memperhatikan kualitas kredit yang akan disalurkan.

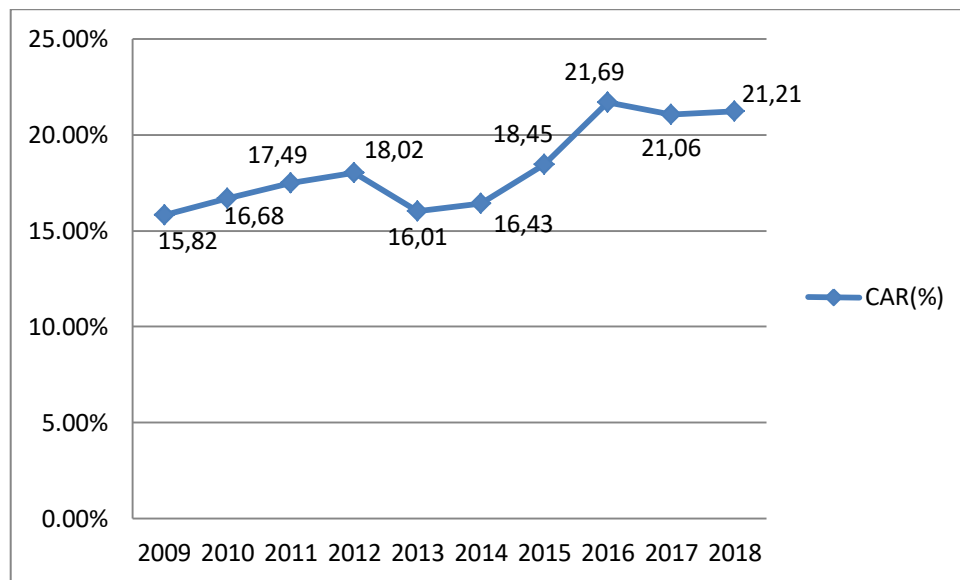
Menurut Riyadi (2004) NPL memiliki 2 jenis dengan perhitungan yang berbeda yaitu *Non Performing Loan Goss* (NPL *gross*) dan *Non Performing Loan Net* (NPL *net*). *NPL gross* adalah perbandingan antara kredit berstatus kurang lancar, dirugikan, dan macet yang disatukan dengan total kredit yang disalurkan. Sedangkan *NPL net* adalah perbandingan antara kredit bermasalah setelah dikurangi CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) terhadap total kredit. Semakin tinggi rasio NPL *net* maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah. Bank Indonesia menetapkan untuk rasio NPL *Net* kurang dari 5% atau di bawah 5% maka penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang harus disediakan bank untuk

menutup kerugian yang ditimbulkan oleh aktiva produktif non lancar (kredit bermasalah) menjadi semakin kecil. Nilai NPL *gross* dan NPL *net* yang dihadapi oleh perbankan suatu negara atau kawasan pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari faktor spesifik bank.

NPL yang tinggi pada suatu negara dapat menyebabkan masalah yang besar. Dampak dari akumulasi NPL yang besar dapat menyebabkan sejumlah aset bank bangkrut dan lembaga keuangan macet (Dziobek dan Pazarbasioglu, 1997). Faktor spesifik bank terdiri dari serangkaian faktor yang mengukur kesehatan sistem keuangan. Faktor spesifik bank adalah faktor yang terkait dengan efisiensi internal dan keputusan manajerial. Faktor-faktor tersebut termasuk faktor modal minimum perusahaan (CAR), probabilitas (ROA), (ROE), (NIM), dan likuiditas bank (LDR). Untuk mengurangi risiko yang terjadi dari masalah kredit, maka bank menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasional bank yang disebut *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri bank di samping memperoleh dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman dan lain-lain (Dendawijaya, 2006). Semakin tinggi modal yang dimiliki bank maka akan semakin mudah bagi bank untuk membiayai aktiva yang mengandung risiko. Jika kredit tidak disertai dengan modal yang mencukupi maka akan berpotensi menimbulkan kredit bermasalah. Oleh karena itu, semakin tinggi CAR akan dapat menekan risiko kredit yang dihadapi bank (Diyanti, 2012). Berikut adalah gambar

mengenai perkembangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada tahun 2009-2018 yaitu:



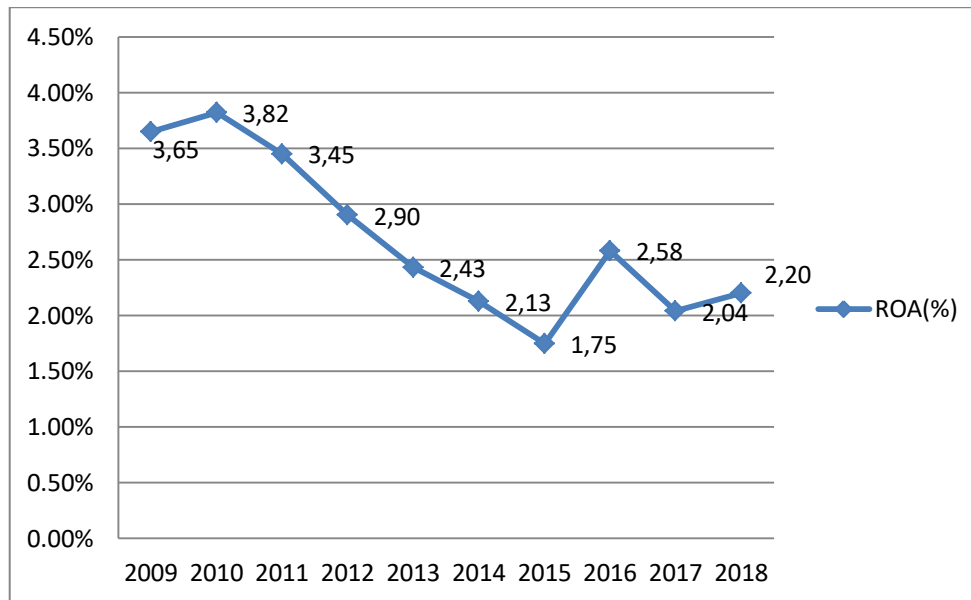
Gambar 1.2 Perkembangan *Capital Adequacy Ratio* Bank Pembangunan Daerah Tahun 2009 – 2018

Sumber :Laporan Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2009- 2018 (diolah)

Rasio kecukupan modal sangat penting dalam menjalankan usaha baik itu lembaga keuangan maupun lembaga lainnya, dikarenakan apabila bank memiliki CAR yang tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut mampu mengatasi risiko yang akan terjadi. Disepanjang tahun penelitian ini CAR mengalami fluktuasi disetiap tahunnya.

Perkembangan CAR Bank Pembangunan Daerah 2009-2018 seperti yang tertera pada grafik di atas terjadi fluktuasi dari awal tahun penelitian sampai akhir tahun penelitian. Seperti Bank Pembangunan Daerah pada awal penelitian memiliki CAR sebesar 15,82%. Pada tahun 2012 CAR Bank Pembangunan Daerah mengalami kenaikan sebesar 18,02% hal ini menunjukkan bahwa rasio

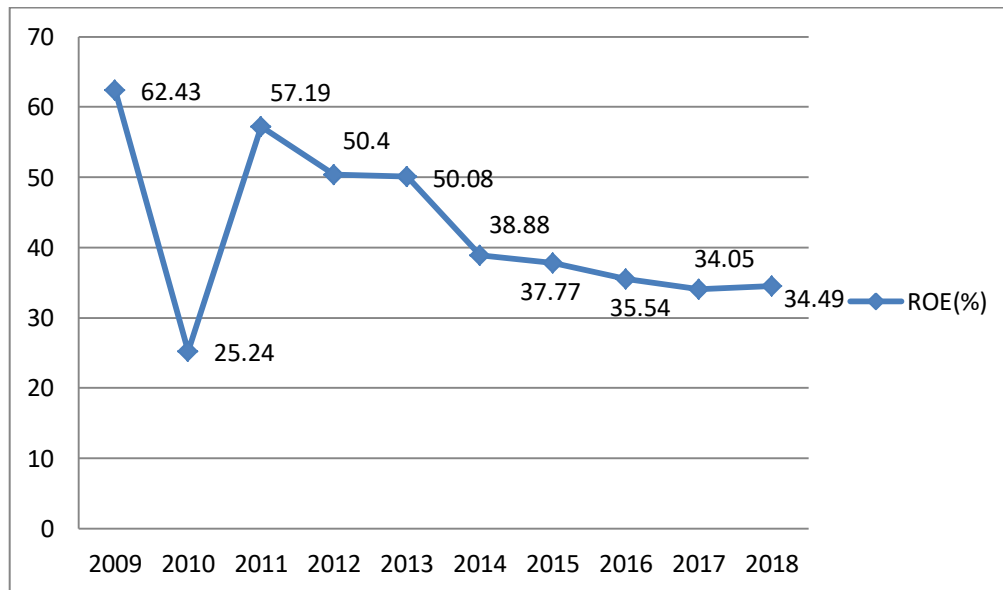
kecukupan modal semakin baik. Rasio perbankan berikutnya adalah ROA yang akan ditampilkan pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.3 Perkembangan *Return on Asset* Bank Pembangunan Daerah Tahun 2009 – 2018

Sumber: Laporan Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2009- 2018 (diolah)

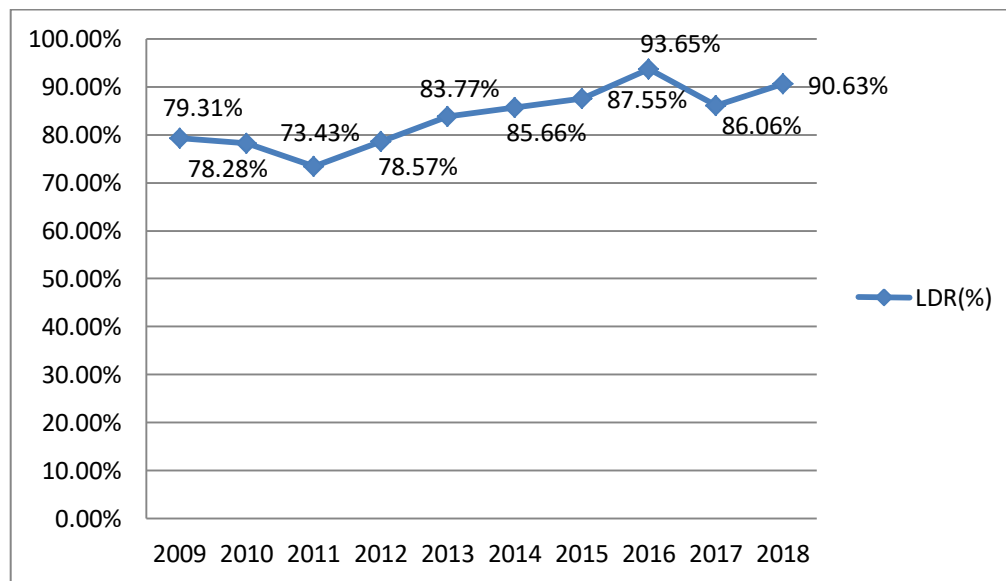
Return on Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Kamir, 2008). Perkembangan rasio keuangan dilihat dari sisi ROA yang mengalami peningkatan dari tahun 2009 yaitu sebesar 3,65% sampai tahun 2010 sebesar 3,82%. Namun tahun 2011 ROA Bank Pembangunan Daerah mengalami penurunan yaitu sebesar 3,45% sampai tahun 2015 sebesar 1,75%. ROA Bank Pembangunan Daerah dari grafik di atas menunjukkan bahwa bank tersebut dalam kondisi sehat karena disepanjang tahun penelitian ini ROA masih berada diatas 1,22% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Rasio perbankan berikutnya adalah ROE yang akan ditampilkan pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.4 Perkembangan *Return on Equity* Bank Pembangunan Daerah Tahun 2009 – 2018

Sumber :Laporan Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2009- 2018 (diolah)

Dendawijaya (2006) menjelaskan bahwa *Return on Equity* (ROE) adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat pada tahun awal penelitian yaitu tahun 2009 ROE sebesar 62,43% dan tahun berikutnya yaitu tahun 2010 ROE BPD mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu sebesar 25,24%. Pada 2011 ROE bank pembangunan daerah mengalami kenaikan 57,19%, namun pada tahun akhir penelitian yaitu 2018 ROE Bank Pembangunan Daerah mengalami penurunan sebesar 34,49%. Rasio perbankan berikutnya adalah LDR yang akan ditampilkan gambar di bawah ini :

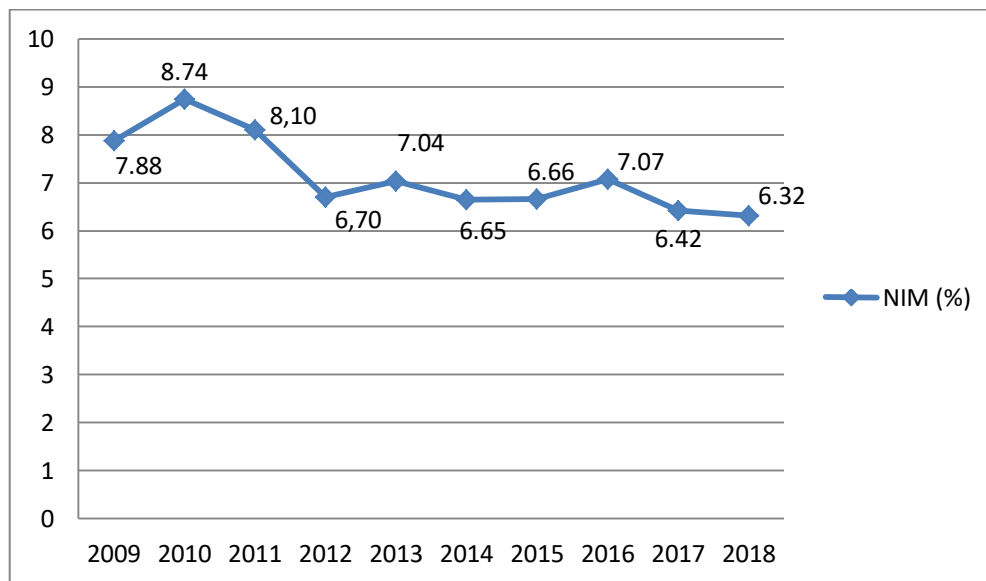


Gambar 1.5 Perkembangan *Loan to Deposit Ratio* Bank Pembangunan Daerah Tahun 2009 – 2018

Sumber :Laporan Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2009- 2018 (diolah)

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Bank Pembangunan Daerah pada 2009-2014 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 LDR Bank Pembangunan Daerah sebesar 79,31% mengalami penurunan sampai 2011 sebesar 73,43%. Pada akhir tahun penelitian 2018 LDR Bank Pembangunan Daerah sebesar 90,63%. LDR Bank Pembangunan Daerah dari grafik di atas menunjukkan bahwa bank tersebut dalam kondisi sehat karena di sepanjang tahun penelitian ini LDR masih berada di bawah 93,75% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Besarnya LDR sebuah bank mampu menggambarkan besarnya peluang munculnya kredit. Artinya, semakin tinggi LDR sebuah bank maka semakin tinggi pula NPL. *Loan to Deposit Ratio* adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank (Dendawijaya, 2006). Rasio perbankan berikutnya adalah NIM yang akan ditampilkan pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.6 Perkembangan *Net Interest Margin* Bank Pembangunan Daerah Tahun 2009 – 2018

Sumber :Laporan Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2009- 2018 (diolah)

Bank harus mengukur kemampuan manajemennya dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih yaitu melalui *Net Interest Margin* (NIM). NIM bank pembangunan daerah mengalami fluktuasi dari awal tahun penelitian 2009 sampai akhir tahun penelitian 2018. Pada 2009 NIM bank pembangunan daerah sebesar 7,88% dan mengalami kenaikan ditahun berikutnya sebesar 8,74%. Kemudian mengalami penurunan pada 2011 sebesar 8,10%. Sampai pada tahun akhir penelitian yaitu 2018 NIM bank pembangunan daerah mengalami penurun sebesar 6,32%.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah faktor spesifik bank (CAR, ROA, ROE, LDR, NIM) berpengaruh terhadap *Non Performing Loan Gross* dan *Non Performing Loan Net* pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh faktor spesifik bank (CAR, ROA, ROE, LDR, NIM) terhadap *Non Performing Loan Gross* dan *Non Performing Loan Net*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Menambah pengetahuan tentang *Non Performing Loan* di lembaga perbankan Indonesia.
- b. Memberikan informasi kepada pembaca tentang pengaruh faktor spesifik bank (CAR, ROA, ROE, LDR, NIM) terhadap *Non Performing Loan Gross* dan *Non Performing Loan Net*.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura.
- b. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian tentang *Non Performing Loan*.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penelitian ini dijabarkan dalam 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai acuan bagi penelitian dasar dalam melakukan analisis. Disini penulis menelaah literatur serta penelitian terdahulu kemudian memberikan kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, jenis penelitian dan sumber data, penentuan populasi dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian dan definisi oprasional dari masing-masing variabel tersebut dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai analisis deskriptif dari objek penelitian serta analisis data pengujian hipotesis dan interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan serta pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.